



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI  
UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DI ERA OTONOMI DAERAH  
(Studi Kasus Kota Bukittinggi)**


**Oleh :**

**RANDI SEPTINO**  
**05 951 046**

**Mahasiswa Program Strata Satu (S - 1) Jurusan Ilmu Ekonomi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat - syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**PADANG  
2010**

	No.Alumni Universitas	<b>RANDI SEPTINO</b>	No.Alumni Fakultas
	<b>BIODATA</b>		
<p>a). Tempat/Tgl lahir: Tanjung Pinang, 18 September 1987 b). Nama Orang Tua: Joni Wirman dan Darwati c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Ilmu Ekonomi e). No.Bp: 05 951 046 f). Tgl Lulus: 3 Juni 2010 g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: 3,03 i). Lama Studi: 4 tahun 10 bulan j). Alamat Orang Tua: Jln By Pass Pakoan Indah 2 No. 75 Bukittinggi - Sumatera Barat</p>			

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DI ERA OTONOMI DAERAH  
(Studi Kasus Kota Bukittinggi)**

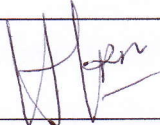
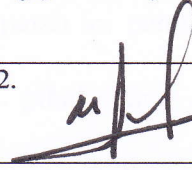
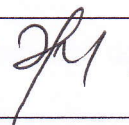
*Skripsi S1 Oleh: Randi Septino*

*Pembimbing: Dr. H.Hefrizal Handra. M. Soc. Sc*

**Abstrak**

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999, memberikan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk membiayai keperluan rumah tangganya sendiri dengan menggali sumber-sumber penerimaan daerah. PAD dan DAU merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa PAD dan DAU memiliki hubungan positif yang kuat dengan belanja modal. Skripsi ini akan menganalisis bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Kota Bukittinggi di era otonomi daerah. Berdasarkan temuan empiris dengan analisis regresi, PAD Kota Bukittinggi secara statistik koefisien regresinya bersifat tidak signifikan dan sama dengan nol. Namun, secara simultan, kedua variabel ini memiliki koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang cukup baik. Oleh karena itu, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Kota Bukittinggi sebesar 92,2%.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada 3 Juni 2010. Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 	3. 
Nama Terang	<b>Dr.H.Hefrizal Handra, M.Soc.Sc</b>	<b>Drs.H.Masrizal. M.Sos.Sc</b>	<b>Zulkifli,N, SE.MSi</b>

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi :

**Prof.Dr.H.Firwan Tan.SE.M.Ec.DEA.Ing**  
NIP. 130812952

\_\_\_\_\_  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus:

Petugas Fakultas / Universitas Andalas		
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Suatu negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu sistem pemerintahan (*governance*) yang baik. Sistem ini sangat diperlukan setidaknya oleh dua hal: pertama sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik di berbagai daerah. Kedua sebagai alat bagi masyarakat setempat untuk dapat berperan serta aktif dalam menentukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya sendiri selaras dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam koridor kepentingan-kepentingan nasional.

Untuk tujuan itu banyak yang harus kita lakukan, salah satunya adalah dengan diselenggarakannya otonomi daerah. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian. Di lain pihak, keadaan di luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk pemerintah daerahnya.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah maka pelaksanaan pembangunan daerah sangat tergantung kepada kemampuan daerah di dalam memanfaatkan semua potensi daerah yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Menurut Syamsi (1994 : 221) daerah otonom harus mempunyai beberapa kemampuan agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya, kemampuan itu antara lain kemampuan keuangan, kemampuan aparatur, kemampuan ekonomi dan sebagainya.

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya.

Semenjak awal kemerdekaan sampai sekarang telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan Otonomi Daerah. Salah satunya UU 5/1974 yang menganut prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Berikutnya di bawah UU 22/1999 dianut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Menurut Kuncoro perbedaan antara otonomi daerah pada UU 5/1974 dengan UU 22/1999 adalah bahwa pada UU 5/1974 hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sedangkan UU. 22/1999 otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan, menurut Kuncoro hal ini menerangkan bahwa UU lama menganut unsur kewajiban. UU baru, menekankan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan menekankan pada pentingnya aspirasi masyarakat, namun UU baru tidak menyebutkan otonomi daerah sebagai hak (2004:22)

Pada tahun 2004, dikeluarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan UU No.22 Tahun 1999. Dalam UU No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan pengujian secara individual dengan menggunakan uji  $t$ , variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal pemerintah daerah. Menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer pemerintah pusat akan menyebabkan penurunan pengeluaran daerah dan begitu juga sebaliknya peningkatan alokasi transfer akan diikuti dengan pengeluaran yang lebih tinggi. Gejala ini memperlihatkan bahwa pemerintah bertindak sangat reaktif terhadap transfer yang diterima dari pusat. Untuk PAD bernilai negatif, menyatakan bahwa, PAD tidak signifikan terhadap BM. Artinya, PAD belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan BM. Hal ini dikarenakan, besarnya ketergantungan penerimaan daerah yang berasal dari dana transfer, sehingga menjadikan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari daerah tidak terlalu diperhatikan.
2. Untuk pengujian secara bersama-sama dengan menggunakan model uji  $F$  dan  $R^2$  menunjukkan bahwa model cukup bagus karena secara bersama-sama variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal sebesar 92,2% variasi variabel independen (Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah) mampu menjelaskan variasi variabel dependen (Belanja Modal).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. "Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali)". Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang. Akses Download: 17 November 2009. 15:00 WIB.
- Abdullah, Sukriy dan Abdul Halim. 2006. "Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan". Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol 2 No.2. Akses Download: 20 Januari 2010. 14:30 WIB.
- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri. 2005. *Keuangan negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". Pada symposium akuntansi X Unhas Makassar 26 – 28 juli 2007. Akses Download: 17 November 2009. 14:30 WIB.
- Davey, Kenneth. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek – praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia*. Edisi ketiga. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Dumairy. 1997. *perekonomian Indonesia*. Jakarta : erlangga.
- Gujarati, Damodar. 1999. "EKONOMETRIKA DASAR" diterjemahkan Sumarno Zain. Jakarta :Erlangga.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai : Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.